

karena alat berpikirnya hilang, yaitu akalnya menjadi hiasan bagi manusia. Khomer berasal dari buah anggur yang selalu diproses apabila telah mendidih, menjadi korma dan menjadi buih. (Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, 1997: 148)

Khomer adalah air anggur (*inab*) yang sudah merangi. Asal kata khomer bukan asli Arab, tetapi berasal dari bahasa Arami (salah satu bahasa negeri Syam, semasa nabi Isa, bahasa bangsa Yunani) Asalnya yang asli ialah menutup, menyembunyikan atau mengaburkan. Oleh bangsa Arami kata itu dipergunakan bagi orang yang mabuk karena minuman anggur. Khomer itu dapat “mengaburkan fikiran” menutup akal, sebagai akibat alkohol. Kata itu masuk kedalam bahasa Arab, khusus sebagai nama air anggur, yang dibuat oleh orang Arami dari Syam dan Mesopotamia. khomer itu adalah perasan anggur dan kemudian dibiarkan meragi. Dalam salah satu lughat (bahasa) di Yunani, khomer berarti “rentengan buah anggur”, dan air perasan buah anggur . (M. Ali Hasan , 1997:174).

Menurut kebanyakan para fuqoha' khomer adalah suatu nama bagi semua minuman yang dapat menutupi akal pikiran, Sedangkan menurut Abu hanifah Khomer adalah khusus yang dibuat dari perasan anggur mentah.

Menurut ulama kufah, seperti An Nakha'i, Ats-Tsauri dan Ibnu Abu Laila bahwa, minuman lain yang memabukkan seperti minuman dari kurma atau gandum, tidak disebut khomer tapi disebut Nabiz.

Jumhur Ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat minuman yang memabukkan, baik bahannya dari perasan anggur, korma, syair atau lainnya,

Gejala kearah terjadinya pembaharuan hukum diarah negara – negara berkembang termasuk di Indonesia, sudah tampak pada era pasca perang dunia ke-dua.

Perkembangan masyarakat di era pasca perang dunia ke-dua, terutama pada pertengahan abad ke-20 ditandai selain karena perubahan – perubahan dari masyarakat agraris menuju kemasyarakat industri, juga ditandai oleh adanya tuntutan pembaharuan di segala bidang, termasuk kedalam bidang hukum tuntutan ini merupakan tuntutan yang wajar dan terjadi hampir pada sebagian besar negara yang baru merdeka, terutama di benua Asia dan Afrika.

Sejak era tersebut muncul berbagai tulisan dari pakar sosiologi dan pakar hukum dari pelbagai negara. (Seidmen, 1978 ; Lukman ; 1978) Zuevekas, 1979 ; snyder, 1980; 1980) mengenai perkembangan hukum pada masa kolonialisme dan perkembangan hukum setelah kemerdekaan pada kontek pembangunan pada negara-negara berkembang (Developing kontries).

Di Indonesia, tulisan mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan dipelopori oleh Kusuma Atmaja (1971) dan secara khusus dibidang hukum pidana dipelopori oleh Soedarto (1981).

Pada awal perkembangannya, negara berkembang berada dalam tahap konsolidasi dan restrukturisasi, terutama dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta sekaligus memenuhi tuntutan pembaharuan disegala bidang, termasuk dalam bidang hukum.

Dalam konteks sistem hukum pidana nasional yang akan datang, Muladi (1990: 8 – 30) telah mengemukakan harapan – harapan dibentuknya suatu hukum pidana nasional dimasa mendatang dengan lima karakteristik operasional Sebagai berikut :

1. Hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata – mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila
2. Hukum pidana dimasa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek – aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia alam dan tradisi Indonesia.
3. Hukum pidana dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Hukum pidana mendatang harus memiliki aspek- aspek yang bersifat presentatif.
5. Hukum pidana mendatang harus tanggap terhadap perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.

Selain itu masih ada pendapat mengenai penyebaran karakteristik operasional hukum pidana secara lebih spesifik dengan menitik-beratkan pada sanksi pidana alternatif, antara lain sebagai berikut :

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu –satunya sehingga apabila perlu dipergunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana “Ultimatum Remedium” tidak menonjolkan sifat “Primum remedium”

Hukum pidana harus dipergunakan lebih - lebih bersifat prepentif daripada cara – cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana mudah diarahkan pada peran “Subsider” yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil, dipergunakan sarana sosial lain yang dianggap cocok.

Hukum pidana dan sanksi pidana dimasa depan harus diusahakan pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi problem sosial dengan bentuk “Prevention and treatment” dan tidak menonjolkan bentuk-bentuk “repression and punishment” (Ibid : 42)

Khusus menyangkut undang-undang serta peraturan pemerintah mengenai resep dan obat disinggung pada Bab “Resep” dan Bab “obat” sebagai berikut :

1. UU No 9 th 1963 tentang pokok – pokok kesehatan serta penjelasan UU tersebut
2. UU No 7 th 1963 tentang farmasi
3. Surat edarn Nomer 2624 / Dirjen / 70 Direktorat jenderal
4. UU RI No. 9 Th 1976 tentang narkotika dan penjelasan atas UU tersebut.
5. SK menteri kesehatan RI Nomor 704/ph/63/b perihal peraturan penyimpanan resep.
6. SK Menteri kesehatan RI Nomor 831/ph/64/b Perihal apotik.
7. Surat keputusan Menteri kesehatan R.I Nomor 193/Kab/B.VII/71 Perihal peraturan tentang pembungkusan dan penandaan obat.
8. Obat-obatan dengan larangan khusus.

1. Memperhatikan rumah tangga, segala kebutuhannya dan metode pendidikan anak-anak.
2. Peringatan di tempat-tempat pendidikan tentang bahaya zat-zat narkoba.
3. Bimbingan terhadap masyarakat pekerja.
4. Membantu proses penyembuhan penyakit bagi seluruh lapisan masyarakat agar orang mudah mengurangi kekalutannya sehingga ia tidak memilih alternatif ketagihan narkoba.
5. Mendukung kegiatan olah raga dan sosial yang diselenggarakan generasi muda.
6. Media massa mempunyai peran yang signifikan dalam berpartisipasi melawan ketagihan narkoba.
7. Dakwah agama di masjid-masjid harus memasukkan problem ketagihan narkoba, harus ada pengaturan tentang penjualan zat-zat narkotika untuk para dokter. (Ali Ahmadi Abu Annur, 2000 : 91).